

SOAL KETAHANAN PANGAN

Tak Setuju Impor Sebagai Solusi

PATI (KR) - Anggota DPR RI Firman Soebagyo SE mengingatkan Badan Pangan Nasional agar fokus menuntaskan target yang telah dicanangkan Presiden Jokowi untuk melakukan swasembada pangan.

"Pernyataan Pak Jokowi mengenai program ketahanan pangan yang sudah menyerap anggaran cukup besar ini patut dicermati, dan harus dilaksanakan para pembantunya," tegas anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo SE, Rabu (22/6).

Seperti diketahui, pada saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (20/6), Presiden Jokowi menagih hasil nyata dari penyaluran anggaran ratusan triliun untuk program ketahanan pangan. Presiden Jokowi membeberkan anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp 92,3 triliun. Alokasi tersebut naik ketimbang 2018 yang hanya Rp 86 triliun.

Menurut politikus Partai Golkar, Firman Soebagyo, anggaran sebesar Rp 92,3 trili-

un merupakan uang yang sangat luar biasa besar. Namun, kalau dilihat dari fakta di lapangan, besarnya anggaran yang sudah digelontorkan tidak berbanding lurus dengan capaian yang diharapkan.

"Tidak pernah memenuhi target yang diinginkan oleh Presiden Jokowi," ucap FS, begitu Firman Soebagyo biasa dipanggil.

Jika betul apa yang disampaikan Presiden, daripada membuang uang yang tidak jelas dan kemudian uang Rp 92,3 triliun dipakai untuk beli beras. "Artinya kan kita mengandalkan impor. Kalau impor terjadi dampak buruknya ke petani. Ini (impor) menunjukkan peringatan sudah ditabuhnya sebuah lonceng kematian bagi petani, bila impor sebagai solosinya," katanya.

Supaya program ketahanan pangan sukses, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini membeberkan beberapa kelemahan yang harus diselesaikan. Pihaknya mengusulkan harus ada konsep besar dalam

kerangka kemandirian pangan yang direncanakan dengan matang oleh Bappenas.

Presiden Jokowi sebelumnya sempat merincikan sebaran anggaran pangan puluhan triliun. Pertama, anggaran Rp 36,6 triliun disebar untuk berbagai kementerian. Kementerian Pertanian mendapat Rp 14,5 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,1 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 15,5 triliun dan kementerian lainnya Rp 600 miliar.

Kedua, anggaran senilai Rp 33,8 triliun dialokasikan untuk subsidi pupuk Rp 25,3 triliun, cadangan beras Rp 3 triliun, belanja stabilitas harga pangan Rp 2,6 triliun dan belanja cadangan subsidi pupuk Rp 2,9 triliun.

Ketiga anggaran sebesar Rp 21,9 triliun. Pos ini tersebar untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 8,1 triliun, DAK non-fisik Rp 2,2 triliun dan sisanya dana

(Cuk)-f

Sumbungan hal 1

sud.

Menko Airlangga berharap, berbagai potensi kerja sama dengan IBM dapat terlaksana sesuai rencana, sehingga dapat semakin meningkatkan potensi ekonomi digital Indonesia dan akan mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan rendah karbon (ekonomi hijau). "Saya menyambut baik rencana IBM terkait pengembangan talenta digital yang diharapkan dapat mendukung upaya penciptaan SDM dengan keahlian yang diperlukan oleh dunia usaha," kata Menko Airlangga.



KR-Istimewa

Wuling Almaz RS dan New Cortez.

istimewa sampai 27 Juni," terang Regional Sales Area Manager Wuling Motors Angga, Rabu (22/6).

Menurut Angga, Wuling membawa serta unit display yang terdiri Almaz RS dan New Cortez. Wuling Almaz RS dilengkapi Wuling Remote Control App yang didukung Internet of Vehicle (IoV), Indonesian Voice Command yang difasilitasi Wuling Indonesian Command (WIND), dan adaptive cruise control serta traffic jam assist di

bawah payung inovasi Advanced Driver Assistance System (ADAS). Flagship SUV Wuling ini juga tersedia dengan opsi konfigurasi 7-seater.

Sedangkan New Cortez merupakan MPV terbaru Wuling yang dilengkapi IoV dan WIND. "Berkat dua inovasi tersebut, Smart MPV ini mengenakan Wuling silver logo pada bagian depan dan belakang. Turut ditambahkan kenyamanan lebih dengan adanya multipurpose seat-tray," ungkapnya.

Transformasi

sampai ke pelosok Indonesia, serta penerapan Program Indonesia 4.0 dalam mendukung perkembangan industri nasional," ungkap Menko Airlangga.

Telah dikembangkan pula sejumlah sub-sektor ekonomi digital, seperti *healthtech* (*telemedicine*), *fintech*, *edutech*, serta pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang melibatkan 115 lembaga pelatihan *online* dan telah diikuti lebih dari 12 juta orang.

Sedangkan General Manager Burton menyampaikan, IBM berencana mendirikan lembaga pelatihan *Hybrid*

Cloud Academy di Pulau Batam. "Lembaga tersebut akan menyediakan program *training* di bidang *cloud development and administration* yang akan mencetak lulusan dengan keahlian digital yang relevan dan dibutuhkan saat ini," ujar Burton.

IBM juga tertarik mendukung pengembangan *data center* di Indonesia, khususnya terkait *security operation center*, serta *training of trainer* di bidang *cyber skill*. Dalam waktu dekat, Burton akan berkunjung ke Batam untuk menjajaki rencana pembangunan lembaga pelatihan dimak-

(Fie)-f

Sumbungan hal 1

Menko Airlangga berharap, berbagai potensi kerja sama dengan IBM dapat terlaksana sesuai rencana, sehingga dapat semakin meningkatkan potensi ekonomi digital Indonesia dan akan mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan rendah karbon (ekonomi hijau). "Saya menyambut baik rencana IBM terkait pengembangan talenta digital yang diharapkan dapat mendukung upaya penciptaan SDM dengan keahlian yang diperlukan oleh dunia usaha," kata Menko Airlangga.

Pembangunan

Lebih lanjut, Presiden meminta agar pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dapat diselesaikan lebih cepat dari rencana. Semua bendungan ini akan rampung pada Desember 2023, namun Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jarot Widyoiko menyanggapi untuk menyelesaikan pada awal 2023. "Dengan adanya percepatan, kami menargetkan akan selesai pada Januari atau Februari 2023," kata Jarot.

Hal lain yang disampaikan Presiden, air baku dari Bendungan Sepaku Semoi akan diolah untuk memasok kebutuhan air bagi 1,5 juta penduduk. "Untuk air yang disalurkan adalah air siap minum," ujar Presiden.

Hal senada disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuliyono. "Kalau (air) enggak bisa diminum langsung, percuma (ibukota) kita pindah," ucap Basuki.

Turut hadir dalam peninjauan Bendungan Sepaku Semoi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Menurut Jarot Widyoiko, Bendungan Sepaku Semoi ini merupakan salah satu dari dua yang sudah on going untuk penyiapan air baku di IKN. Sekarang progres di Bendungan Sepaku Semoi sudah 56 persen.

Jarot menjelaskan, bendungan yang ditargetkan selesai awal 2023 tersebut akan memberikan manfaat air baku sebesar 2.500 liter/detik dengan kapasitas tampung 10 juta meter kubik. Melalui manfaat tersebut, Bendungan Sepaku Semoi akan memberikan manfaat tidak hanya di IKN dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tetapi juga di Kota Balikpapan.

(Ant)-f

Sumbungan hal 1

"Jadi kapasitas Sepaku Semoi itu 2.500 (liter/detik), 500 (liter/detik) untuk Kota Balikpapan, yang 2.000 (liter/detik) nanti akan dikirim untuk KIPP dan IKN secara menyeluruh," kata Jarot.

Selain Bendungan Sepaku Semoi, Pemerintah juga sedang membangun Intake Bendungan Sepaku yang saat ini progres pembangunannya baru mencapai 13 persen. Nantinya, Intake Bendungan Sepaku akan memberikan manfaat air baku sebesar 3.000 liter/detik dan ditargetkan selesai Desember 2022.

"Insya Allah Desember 2022 akan kami selesaikan sehingga Februari 2023 itu sudah bisa kurang lebih 5.000 (liter/detik)," ungkap Jarot.

Jarot meyakini target pembangunan infrastruktur pendukung IKN tersebut dapat selesai tepat waktu, dan target penyediaan air baku 5.000 liter/detik pada 2035 dapat tercapai dengan baik.

Sutradara

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tapi karena pandemi akhirnya berganti menjadi inisiatif pemerintah dan mestinya Presiden harus tahu karena RUU Sisdiknas menjadi inisiatif pemerintah.

Lebih mengherankan lagi, tatkalta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyampaikan Presiden Jokowi tidak mengetahui proses perubahan revisi UU Sisdiknas karena masih tahap perencanaan. Dalihnya, Kemendikbudristek sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dan pembentukan RUU Sisdiknas saat ini masih pada tahap perencanaan. Karena berdasarkan UU PPP, ada lima tahap dalam proses pembentukan sebuah undang-undang, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Begitu pula dengan dalih bahwa pembahasan substansi RUU Sisdiknas yang belum waktunya sampai ke Presiden karena revisi UU Sisdiknas masih masuk *long list*, daftar panjang, prolegnas tahun 2019-2024. Sehingga Kemendikbudristek sedang mempersiapkan naskah akademik dan juga draf RUU untuk diaju-

kan kepada Baleg DPR supaya dapat masuk ke daftar Prolegnas prioritas 2022.

Dalam bahasa penulis, lantas kini siapakah yang menjadi sutradara pendidikan di Indonesia? Karena tentu tidak ada asap tanpa ada api. Apa yang salah dengan UU Sisdiknas, sehingga perlu ada revisi? Ada apa dengan UU Sisdiknas, sehingga perlu revisi? Begitu urgenkah merevisi UU Sisdiknas? Atau siapakah sesungguhnya otak di balik inisiatif utama yang ingin merevisi UU Sisdiknas yang katanya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman?

Budaya lempar batu sembunyi tangan dalam dunia pendidikan mesti harus diubah jauh-jauh. Dunia pendidikan harus membangun watak kesatriya, bukan watak *plin-plan*, *oportunis* dan pragmatis. Apalagi bagi pemimpin pendidikan, mestinya paham tentang akar persoalan sampai pada aspek filosofi pendidikan, bukan hanya bisa mengkapitalisasi pendidikan. Istilah inovasi bukan saja hanya sebatas membangun kolaborasi, tetapi menghasilkan karya baru yang mumi dari elakui pendidikan.

Sangat wajar apabila akademisi ada kekhawatiran terhadap masa depan pendidikan di tanah air. Sutradara Pendidikan

(Fie)-f

Sumbungan hal 1

dibutuhkan mengingat banyak sekali persoalan penting dan mendesak tentang masa depan pendidikan nasional yang jauh dari penanganan segera. Sementara agenda merevisi RUU Sisdiknas harus melalui jalan panjang dengan membuat kajian sebelum revisi UU Sisdiknas dilakukan. Artinya, bahwa perumusan peta jalan pendidikan Indonesia sebagaimana kondisi rasional dan kemauan politik pemerintah dan DPR merevisi UU Sisdiknas belum mencapai titik temu yang melegakan.

Rakyat berharap jangan sampai auto pilot dunia pendidikan terjadi masif di tanah air. Syahwat merevisi RUU Sisdiknas melaju dengan kecangginya, tetapi justru penanggung jawab dari perubahan tidak berani membusungkan dadanya. Siapakah konseptor dan inisiator utama dari revisi RUU Sisdiknas juga tidak tampak batang hidungnya. Autopilot pada dunia pendidikan menjadi tak terlakkan bila sutradara pendidikan di Indonesia tidak berani menampakkan dirinya.

(Pemerhati kebijakan pendidikan, Dosen Magister Pendidikan Sains FKIP UNS Surakarta)-d

Jemaah

Menurut Fauzin, pada musim haji tahun ini, pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Perusahaan Motawif Jemaah Haji Asia Tenggara (Motowifs Pilgrims For South East Asian Countries Company) telah mengeluarkan surat petunjuk tentang Dam dan Kurban Tahun 1443 H. Surat ditujukan kepada Perwakilan Misi Haji Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand.

Menurut Fauzin, surat edaran tersebut menginformasikan, jemaah dapat membayar dam melalui saluran pembayaran yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi, yaitu Bank Pembangunan Islam (IsDB), Bank Al Rajhi, Pos Saudi dan Situs (ADAH). Disebutkan dalam edaran tersebut, keempat lembaga tersebut dipilih berdasarkan sejumlah kriteria antara lain, bank penerima setoran dam adalah lembaga resmi yang ditunjuk Pemerintah Kerajaan

Arab Saudi, sehingga akuntabilitas kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan.

Kemudian, memiliki *lajnah thibbi* yang bertugas menyeleksi binatang yang memenuhi syarat untuk dijadikan hadyu. Selain itu, juga mempunyai *lajnah syari'fiqhi*, yang bertugas mengawasi dan memastikan keabsahan penyembelihan, distribusi dan lainnya yang berkaitan dengan aspek fikih.

Sementara itu, karena suhu di Madinah panas, maka kalau berjalan tanpa alas di siang hari bisa menyebabkan kaki melepuh. Sebab, lantai halaman Masjid Nabawi maupun jalan menuju penginapan

kalau diinjak dengan kaki telanjang terasa panas berlebih.

Menurut Ketua Kloter 18 SOC, Nurhuda, ada satu jemaah asal DIY yang kakinya bengkok karena panas. Supaya mendapatkan perawatan yang intensif, yang bersangkutan sudah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKH).

Mengenai kegiatan jemaahnya, Nurhuda menjelaskan, setelah mendapatkan jadwal dari Daker yang dikirim petunjuk sektor Madinah, H Ahmad Fauzi SH, kemarin pagi sebanyak 164 jamaah haji wanita kloter 18 SOC berkesempatan ke Raudhah.

Prakiraan Cuaca					Kamis, 23 Juni 2022	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					23-31	70-95
Sleman					23-30	75-95
Wates					23-31	70-95
Wonosari					23-30	70-95
Yogyakarta					23-31	70-95
Cerah Berawan Udara Kabur Hujan Lokal Hujan Pelir					Grafis : Arko	

Golput dan Pemilihan Presiden



Yulinda Eristyarin, SIKom MMed Kom Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas AMIKOM Yogyakarta

GELIAT Pemilihan Presiden 2024 sudah mulai terasa suasana-nya, partai-partai koalisi sudah mulai mengatur strategi calon presiden dan wakil presiden mana yang akan bertarung di kursi Pilpres. Pemilu dalam sebuah negara demokrasi sudah menjadi rutinitas dalam menentukan regenerasi kepemimpinan. Para teoritis klasik percaya

bahwasananya partisipasi politik khususnya pemberian suara dalam pemilihan umum merupakan kunci menuju suatu pemerintahan yang demokratis. Pada momen pemilu itulah masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan pemimpin-nya.

Dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun ini, semua lapisan masyarakat menyuarakan pilihannya lewat surat suara. Namun, dalam praktiknya pada saat hari pencoblosan yang sudah ditetapkan, pada tahun 2019 lalu fenomena golput masih terjadi dan sering menyita perhatian banyak pihak dari masa ke masa. Begitu pula pada gelaran Pemilu Pilpres 2024 mendatang, dimana praktik golput ini sangat sulit dihindari. Sebab, tidak ada dalam sejarah partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang mampu mencapai presentase angka sempurna yaitu 100 persen.

Berdasarkan data hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dengan 100% sampel, data golput pada Pilpres tahun 2019 mencapai 19,24%. Angka tersebut rupanya melawan trend golput yang terus naik sejak pemilu pasca reformasi. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat golput sebesar 23,30% pada Pilpres 2004, 27,45% pada tahun 2009, dan presentase sebesar 20,42% pada tahun 2014. Penurunan angka pada tahun 2019 dari tahun 2014. Menilik penyebab penurunan presentase golput dikarenakan adanya persaingan ketat antar kedua pasang kandidat capres dan cawapres kala itu, selain juga meningkatnya partisipasi kelompok minoritas nonmuslim akibat adanya Gerakan 212 pada tahun itu.

"Golongan putih" atau yang sering kita kenal dengan golput adalah sebutan yang dialamatkan

kepada orang atau individu yang tidak ingin menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Atau sering pula didefinisikan kepada sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu. Intinya, golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan siapa pemimpin negaranya yang akan datang.

Dalam literatur perilaku memilih, penjelasan golput merujuk pada perilaku nonvoting. Perilaku non-voting umumnya digunakan untuk merujuk pada perilaku pada fenomena ketidakhadiran seseorang dalam pemilu karena tidak adanya motivasi. Di beberapa negara, perilaku nonvoting umumnya dilakukan dalam berbagai bentuk. Negara Brazil misalnya, para memilih melakukan dalam bentuk ketidak-hadiran pada saat momen pemilu,

namun ada pula yang dilakukan dalam bentuk merusak kartu suara atau tidak mencoblos (*blank and spoiled ballots*). Perilaku tidak memilih seperti ini biasanya dipakai oleh para pemilih sebagai bentuk proes terhadap pemerintah, partai politik, serta lembaga demokrasi lainnya.

Lantas bagaimana dengan Pemilu Pilpres 2024 yang akan datang? Meskipun Pemilu 2024 masih akan dilaksanakan kurang lebih 2 tahun lagi. Isu mengenai golput kembali mencuat. Beberapa kelompok bahkan secara tegas mulai menyerukan golput dalam pagelaran ajang pemilu serentak mendatang. Kelompok tersebut meyakini bahwa tidak memilih salah satu calon yang ditentukan, juga merupakan sebuah pilihan. Sebab, mereka percaya golput juga termasuk hak politik setiap warga negara.

Munculnya fenomena golput



tidak lepas adanya kekecewaan serta ketidakpuasan masyarakat pada pemerintah, sekaligus ketidakpercayaan mereka pada oposisi. Pemerintah dinilai tidak berhasil dalam menuntaskan berbagai isu selama masa pemerintahannya. Adapun pihak oposisi juga dipandang tidak memiliki prospek kepemimpinan yang menjanjikan Kepercayaan publik juga tergerus sebab Presiden pada pemerintahan sekarang tidak dapat memenuhi janjinya guna memperkuat KPK apa yang terjadi justru sebaliknya, KPK kian runtuh. Akankah fenomena golput semakin marak pada pemilu yang akan datang? Semoga para pemilih juga dapat menyuarakan aspirasinya dan memilih dengan bijak siapa pemimpin yang menjadi pilihan yang tepat dan adil bagi masyarakat.***